

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FIKTIF POSITIF DALAM  
GOOD GOVERNANCE**

**( Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan )**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

**Riga Nova Kurniawan**

**NPM : 1521020059**

**Program Studi : Siyasah Syar'iyah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FIKTIF POSITIF DALAM  
GOOD GOVERNANCE**

**( Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan )**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Oleh**

**RIGA NOVA KURNIAWAN**

**NPM : 1521020059**

**Program Studi : Siyasah Syar'iyah**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pendalaman sudut pandang permasalahan dalam riset skripsi sangat dibutuhkan. Makna dari pemahaman permasalahan yang tidak samar ialah, demi mempermudah langkah yang logis dan terstruktur dalam telaah riset. Judul skripsi ini adalah “Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap *Fiktif Positif* dalam *Good Governance* (Studi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”.

Beberapa kata judul skripsi yang perlu penajaman makna, sebagai berikut :

1. Makna arti analisis merupakan sebuah kegiatan dan usaha pencarian hakikat dengan penyidikan menyeluruh atas suatu insiden.<sup>1</sup>
2. Secara umum *fiqh siyasah* merupakan suatu ilmu yang membahas ketatanegaraan Islam, terutama membahas yang berkaitan dengan mengatur kehidupan umat. Lebih terperinci lagi pembahasan *fiqh siyâsah* berkaitan dengan pengaturan kenegaraan. Pengaturan berbentuk kebijakan pemimpin atas nama pemerintah yang berasaskan dengan ajaran Islam, dengan tujuan kemaslahatan manusia di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011), h. 58.

<sup>2</sup> Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 11.

3. *Fiktif positif* merupakan mekanisme administrasi pemerintahan, di mana instansi atau administrator tata usaha negara wajib mengeluarkan penetapan keputusan dan disertai atau tidaknya tindakan dalam tenggang waktu tertentu. apabila syarat telah terpenuhi dan tenggang waktu terlewati tanpa ada keputusan baik disertai atau tidak tindakan, sikap diam instansi atau administrator tata usaha negara dianggap telah mengabulkan (menyetujui) permohonan.<sup>3</sup>
4. Menurut Lembaga Administrasi Negara<sup>4</sup> makna arti *good governance* adalah peroses dalam cara mengurus pelaksanaan kekuasaan negara yang bertujuan akhir *public good and services*".<sup>5</sup>

Makna kata dalam istilah di atas menyimpulkan pokok riset skripsi ini adalah: “menganalisis suatu kajian tentang mekanisme administrasi pemerintah yang mengabulkan permohonan karena tidak adanya tanggapan dari instansi atau administrator tata usaha negara sebagai satu proses pelaksanaan negara yang bertujuan *public good and services* serta sudut pandangan ketatanegaraan Islam terhadap kebijakan tersebut.

---

<sup>3</sup> Enrico Simanjuntak, “Keputusan Fiktif Negatif Dan fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.VI No. 3 (November 2017), h. 382.

<sup>4</sup> Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN.

<sup>5</sup>Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Pengawas Keuangan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN dan BPKP, 2000), h. 1.

## B. Argumen Pemilihan Judul

### 1. Argumen Ilmiah

Mekanisme pelayanan publik terutama pelayanan dalam administrasi selama ini masih dianggap buruk, identik dengan kelambanan dan ketidakadilan. Telah banyak cara yang pemerintah lakukan demi menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien kepada masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada tahun 2014, salah satu kebijakan pemerintah dalam masalah administrasi adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi pemerintah. Mekanisme administrasi tersebut mengadopsi konsep *lex silencio positivo* atau di Indonesia dikenal dengan *fiktif positif*. Penerapan konsep *fiktif positif* di Indonesia telah menyesuaikan dengan keadaan Indonesia, namun penerapan tersebut masih memiliki beberapa komplikasi yang belum tuntas dan perlu disempurnakan.

### 2. Argumen Non Ilmiah

- a. Penuntasan riset skripsi ini didukung dengan ketersediaan literatur-literatur yang cukup.
- b. Permasalahan riset skripsi sangat berkaitan dan sejalan dengan program studi *siyasah syar'iyah* atau ketatanegaraan Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Sebuah Pemerintahan pastinya memerlukan administrasi untuk mengatur pemerintahannya. Pengaturan administrasi tidak terkecuali bagi pemerintahan Indonesia yang merupakan negara yang sangat luas dan besar. Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah sistem atau kebijakan dalam pengaturan negara demi tercapainya tujuan negara.<sup>6</sup> Ilmu administrasi sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam salah satunya adalah administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, administrasi pemerintahan sendiri merupakan satu cara pengelolaan terkait pengambilan keputusan dibersamai atau tidaknya tindakan oleh instansi atau administrator tata usaha negara.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam kaitanya administrasi memiliki peran yang melingkupi peran pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan, dan pelayanan.<sup>8</sup> Berkaitan dengan pelayanan, pemerintah wajib menyediakan pelayanan administrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan setiap warga negara. Pelayanan administrasi ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Meski tidak mengatur secara terperinci namun sangat jelas pelayanan administratif merupakan tugas pemerintahan terutama pelaksana dan pengurus pelayanan publik dalam melayani masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Administrasi Negara, (On-line), tersedia di: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-administrasi-negara.html> (24 juli 2019).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelaksanaan pelayanan publik saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. prakteknya banyak terjadi pelayanan publik yang kurang baik bahkan terkadang diwarnai dengan pungutan liar (pungli) dan diskriminasi.<sup>10</sup> Contoh pelanggaran yang terjadi dalam pelayanan publik ketika para oknum pemerintahan meminta masyarakat (pemohon pelayanan) untuk membayar uang lebih dari ketentuan guna mempermudah jalannya administrasi, dan bila tidak membayar uang tertentu maka para oknum ini akan mempersulit masyarakat (para pemohon) dalam proses administrasi. Dalam contoh lain ketika terdapat dua pemohon antara miskin dan kaya, yang akan menjadi prioritas adalah pemohon yang mempunyai uang dan pangkat.<sup>11</sup>

Pelayanan administrasi yang sering mendapatkan keluhan biasanya berkaitan dengan surat keputusan yang pemohon ajukan seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain. Seringkali dalam menunggu keputusan yang dimohonkan, timbul permasalahan dari ketidak pastian kapan hal tersebut didapatkan, respon yang lambat bahkan tidak ditanggapinya suatu permohonan meskipun telah sesuai standar operasional prosedur (SOP).<sup>12</sup>

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, pembentukan undang-undang ini dilatar

---

<sup>10</sup> Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia Sudahkah Berlandas Konsep "welfare state"?". *Jurnal Konstitusi*, vol. 11 No. 3 (September 2014), h. 451.

<sup>11</sup> Pungli di Pelayanan Publik Diakui Turunkan Wibawa Pemerintah" (On-line), tersedia di : <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/12090911/pungli-di-pelayanan-publik-diakui-turunkan-wibawa-pemerintah> (20 November 2020)

<sup>12</sup> Budiamin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif Dan fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik". *Tanjungpura Law Journal*, vol. 1 No. 1 (Januari 2017), h. 27.

belakangi dalam pembenahan pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan suatu upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepastian hukum sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal 1 angka 3.<sup>13</sup> Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini mengadopsi konsep *lex silencio positvivo* atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah penerimaan permohonan tanpa tindakan.<sup>14</sup> Adapun bunyi pasal 53 ialah sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan tenggang waktu tanggapan penetapan keputusan dan disertai atau tidaknya tindakan, diatur berdasarkan peraturan berlaku.
2. Apabila peraturan berlaku tidak menetapkan tenggang waktu seperti isi pasal (1), instansi atau administrator tata usaha negara wajib menanggapi permohonan dengan tenggang waktu 10 hari kerja dihitung sejak penerimaan berkas secara sepenuhnya.
3. Jika tenggang waktu seperti isi ayat (2), instansi atau administrator tata usaha negara masih belum menetapkan keputusan dan dibersamai atau tidaknya tindakan, maka permohonan dinyatakan telah disetujui secara hukum.
4. Pihak pemohon selanjutnya mengusulkan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan putusan penerimaan permohonan seperti isi ayat (3).

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” (On-line), tersedia di : <http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/> (24 juli 2019)

<sup>14</sup> *Ibid*, Enrico Simanjuntak, h.379.



5. Pengadilan Tata Usaha Negara diwajibkan memutuskan permohonan seperti yang dirancang pada ayat (4) dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diusulkan.
6. Instansi atau administrator tata usaha negara diwajib mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang dirancang pada ayat (5) dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>15</sup>

Pada pasal 53 di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap instansi atau administrator tata usaha negara diharuskan menerima dan menanggapi setiap permohonan masyarakat yang diterima, yang telah sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengajuan permohonan berlaku. Apabila instansi atau administrator tata usaha negara lalai dalam menjalankan tugasnya (diam saja atau tidak ada tanggapan) dan telah melewati tenggang waktu. Maka dianggap instansi atau administrator tata usaha negara telah mengeluarkan suatu putusan yang berisi penerimaan permohonan (*fiktif positif*).

Konsep *fiktif positif* diharapkan memudahkan masyarakat dalam pengajuan permohonan serta memberikan kejelasan aturan kepada rakyat dalam pemberian layanan yang menjadi haknya. lebih jauh lagi konsep ini memberikan kontrol atau pengawasan kepada pelayanan publik terutama berkaitan dengan administrasi agar lebih transparan dalam penyelenggaraannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 53.

Banyak kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan konsep *fiktif positif* di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menggariskan arah tatanan kekuasaan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya *fiktif negatif* ke *fiktif positif*. Perubahan pergantian kekuasaan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas tidak disiarkan namun pergantian secara konsep haruslah terjadi dengan memakai asas hukum *lex posterior derogate legi priori*, di mana peraturan yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya. Asas ini akan terjadi bila dua peraturan mengurus masalah sama di dalam kedudukan yang sama pula.

Mengesampingkan problematika di atas, yang menjadi latar belakang pengambilan masalah *fiktif positif* dalam riset ini tertuju pada relevansi konsep *fiktif positif* dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apakah telah sesuai terhadap konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) lalu bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap permasalahan ini.

*Fiqh siyasah* sebagai suatu ilmu ketatanegaraan Islam berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan berkehidupan dalam suatu pemerintah demi tercapainya keselamatan umat.<sup>16</sup> Pengaturan semua aspek urusan dalam agama Islam telah sangat sempurna tidak terkecuali dalam bernegara, namun Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pangkal ajaran hukum hanya menjelaskan secara umum, disaat itulah diperlukan ulama (*mujtahidin*) agar melakukan ikhtiar yang mendalam demi pencarian hukum.

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5.

Ruang lingkup *siyasah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Menurut Pembidangan kurikulum Fakultas Syari'ah ruang lingkup *fiqh siyasâh* dibedakan jadi empat bidang, yaitu :

1. *Siyasâh\_dustûriyyah*.
2. *Siyasâh\_mâliyyah*.
3. *Siyasâh\_dauliyyah*.
4. *Siyasâh\_harbiyyah*.<sup>17</sup>

Dari pembagian bidang di atas, riset tentang *fiktif positif* dalam *good governance* lebih sesuai menggunakan *siyasah dustûriyyah*, dalam bukunya Fiqh Siyasah, Djazuli berpendapat *siyasah dustûriyyah* berhubungan dengan pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan dalam masyarakat tersebut. Bila diteliti lebih dalam *siyasah dustûriyyah* dapat dipecah lagi jadi beberapa bidang yang secara langsung berkaitan dengan fokus masalah riset, yaitu: *tasyrî'iyyah*, *tanfiziyyah*, *qadhâ'iyyah* dan *idâriyyah*.<sup>18</sup>

#### D. Fokus Riset

Pokok bahasan pada skripsi ini ialah mengkaji berkaitan dengan relevansi konsep *fiktif positif* dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pandangan *fiqh siyasah* terhadap konsep tersebut.

---

<sup>17</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 48.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 73-75.

#### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Relevansi Konsep *Fiktif Positif* Terhadap *Good Governance* di Indonesia ?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Konsep *Fiktif Positif* dalam *Good Governance* di Indonesia ?

#### F. Tujuan Riset

1. Agar memahami relevansi konsep *fiktif positif* terhadap konsep *good governance*.
2. Untuk memahami pandangan *fiqh siyasah* terhadap konsep *fiktif positif* dalam *good governance*.

#### G. Signifikansi Riset

1. Sudut pandang teori, telaah ini diselesaikan dengan dedikasi penulis didasarkan akan hasrat melahirkan karya tulis ilmiah. Hasil riset diharapkan menjadi penerang serta sebagai sumbangan keilmuan dalam sistem administrasi ketatanegaraan Islam yang moderat.
2. Sudut pandang praktis, telaah ini dibuat supaya dapat menjadi acuan riset berikutnya terutama berkaitan tentang konsep *fiktif positif*. Penyelesaian riset skripsi ini juga merupakan pembuktian penuntasan tugas akhir mahasiswa demi mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Tinjauan Pustaka

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) bukan lagi hal yang pelik dan khusus pada masa ini. Telah banyak riset yang menggunakan prinsip *good governance* sebagai dasar perspektif risetnya. Tidak hanya satu tapi sudah banyak riset dilahirkan terkait dengan *good governance*. Meskipun telah banyak riset tentang *good governance*, peneliti menyelidiki masih belum menemukan riset yang secara detail berkaitan “analisis *fiqh siyasah* terhadap *fiktif positif* dalam *good governance* (studi pasal 53 undang-undang administrasi pemerintahan)” melainkan penulis hanya menemukan:

1. Riset pertama adalah riset oleh Yulian Prabowo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru)". Permasalahan pada riset adalah peninjauan faktor pendukung dan penghambat *good governance* serta pendapat perspektif hukum Islam. Metode riset yang digunakan merupakan riset lapangan dengan analisis deskriptif induktif. Hasil riset menunjukkan penerapan prinsip *good governance* meningkatkan kualitas pelayanan berjalan dengan baik. terdapat beberapa kendala dalam penerapan seperti kurangnya personil kelurahan dan pembenahan produktivitas dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Dalam tinjauan hukum Islam *good governance*

dapat dipersamakan dengan prinsip berkeadilan, bermanfaat, kebersamaan, dan menepati janji.<sup>19</sup>

2. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 oleh Enrico Simanjuntak dari Instansi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI dengan judul “Perkara *Fiktif Positif* dan Permasalahan Hukumnya”. Kesimpulan dari riset tersebut adalah masih perlunya analisis dan kajian mendalam hukum administrasi, baik mengharmonisasi atau inovasi hukum terutama kekosongan hukum. Perlunya kajian tersebut demi mempertegas dasar *fiktif positif* dalam studi hukum administrasi.<sup>20</sup>

#### I. Metode Riset

Metode kualitatif merupakan cara yang digunakan dalam riset ini. Penerapan metode akibat dari pokok bahasan riset yang berkaitan dengan asas hukum yang berimplikasi pada suatu gejala yuridis. Pencarian dan penjelasan analisis data lebih banyak menggunakan kata-kata. Analisis yang digunakan dilakukan secara bertahap dan berlapis demi pencarian yang lebih terperinci dan logis. Penjelasan terperinci sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi di Kelurahan Way Dadi Baru”. (Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan, Lampung, 2017)

<sup>20</sup> *Ibid*, Enrico Simanjuntak.

### 1. Jenis dan Sifat Riset

Skripsi ini ialah riset hukum (*legal research*) yang berjenis riset kepustakaan (*library reseach*) dan bersifat *yuridis normatif*.<sup>21</sup> Pelaksanaan riset karena berjenis kepustakaan, maka akan menggunakan literatur yang ada, baik dari buku, maupun laporan hasil riset terdahulu.

### 2. Data dan Sumber Data

Jenis informasi pada riset ini menggunakan bukti hukum primer dan bukti hukum sekunder karena merupakan riset pustaka.<sup>22</sup> Adapun bukti tersebut ialah :

- a. Bukti hukum primer yaitu sumber pokok dari bahasan skripsi berupa undang-undang, peraturan, yurisprudensi, asas hukum, Al-Quran, Al-Sunnah, dan buku yang mengkaji fiqh siyasah.
- b. Bukti hukum sekunder merupakan data pendukung dan penjelas dari bukti hukum primer. Bahan diperoleh dengan menelusuri buku-buku teks hukum, riset terdahulu, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

### 3. Pengumpulan Data

Penggunaan teknik dalam mengumpulkan data riset skripsi ini ialah kepustakaan dan dokumentasi :

- a. Teknik pengumpulan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dicari, mencatat, dan melakukan inventarisasi serta mempelajari peraturan undang-undang yang berhubungan dengan kajian yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Zainuddin, *Metode Riset Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 106.

- b. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, media Online dan sebagainya.

#### 4. Pengolahan Data

Memproses dan mengolah data yang telah terhimpun haruslah sesuai dengan aturan dasar yang berlaku, adapun langkah yang perlu dilakukan ialah:

- a. *Editing*, merupakan aksi krusial dalam mengolah data riset. Menjawab pertanyaan, keterkaitan data yang terhimpun apakah telah sesuai dengan permasalahan serta apakah data tersebut telah mencukupi guna memulai riset.
- b. *Coding*, tindakan selanjutnya ialah meninjau data terhimpun. Membedakan data terhimpun membaginya dan menandainya berdasarkan jenis data, baik bahan primer atau bahan sekunder.
- c. *Recontrukting*, ialah bagian di mana data terhimpun akan diformulasikan sesuai dengan aturan dasar riset yang telah dibakukan. Bagian ini berperan penting agar data tersaji mudah dimengerti dan konsekutif.
- d. *Sistematisizing*, tindakan terakhir mengolah data adalah penempatan data riset dalam skripsi yang telah ada aturan bakunya sehingga tidak dapat sembarangan. Perbedaan inilah yang membagi karya tulis ilmiah atau bukan yaitu, metode penelitian.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 107.



## 5. Analisis Data

Analisis riset ini menggunakan pendekatan berfikir induktif. Merupakan pendekatan yang bermula dari karakter distingtif yang mengukur permasalahan global. Metode ini bertolak dari pernyataan tunggal yaitu *fiktif positif* untuk menganalisis pada pernyataan-pernyataan yang bersifat universal (*good governance*). Setelah mengetahui hasil analisis dari kedua faktor, akan dianalisis kembali menggunakan *fiqh siyâsah* sebagai pandangan akhir.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Penafsiran dan Cakupan *Fiqh Siyasah*

#### 1. Tafsir *Fiqh Siyasah*

Menurut bahasa kata *fiqh siyasah* terbagi menjadi dua, pertama adalah kata *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* yang berasal dari Bahasa Arab. Semula dibangun dengan *tasrifan* kata-kata (*faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*) ialah pengetahuan yang dimiliki seorang. Pengetahuan dimaksud berada pada titik terdalam.<sup>1</sup> Maksud pada titik terdalam pada penjelasan di atas ialah, keilmuan seorang baik dalam perkataan atau dan perbuatan dimaksud, dapat dimengerti sangat akurat dan menyeluruh.

Ilmu *fiqh* yang merupakan pemikiran *mujtahidîn*, dirumuskan dan digali dari hakikat batang pokok (*ushul*) agama Islam. Hakikat atau batang pokok tersebut tidak dapat berubah dan tidak boleh diganti karena merupakan ketetapan langsung dari Allah. Berbeda dengan ilmu *fiqh* itu sendiri yang merupakan cabang-cabang (*furu*) dari (*ushul*). *Fiqh* dapat berubah dan berkembang sejalan perubahan zaman dan tempat.<sup>2</sup>

Kata kedua ialah “*siyasah*” yang berawal dari kata *sâsa*. Kata *sâsa* berarti, pengaturan, pengendalian, pengurusan, atau melakukan sebuah keputusan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa* ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015 ), h. 9.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 15-16.

<sup>3</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 40.

Pengertian kebahasaan di atas mengisyaratkan bahwa maksud dan tujuan *siyasah* adalah pengaturan dan pengendalian yang bersifat politik atau dalam konteks kenegaraan.

Secara istilah *siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Muhammad Iqbal,<sup>4</sup> menyebutkan *siyasah* ialah pemeliharaan ketertiban dan hajat masyarakat oleh pemerintah melalui aturan undang-undang agar segala kondisi terkendali dan terarah.

Definisi *fiqh siyasah* dari bahasa dan istilah dapat disimpulkan bahwa, *fiqh siyasah* ialah pengetahuan yang secara akurat dan menyeluruh tentang keilmuan pemeliharaan masyarakat oleh pemerintah dengan aturan kenegaraan yang tidak bertentangan syara atau hukum (Allah).

## **2. Cakupan *Fiqh Siyasah***

Berdasarkan pengertian *fiqh siyasah*, dapat terlihat sekilas apa saja yang menjadi ruang lingkup *fiqh siyasah*, tentu saja tidak terlepas dari pengaturan kehidupan manusia dalam ketatanegaraan. Pada perkembangannya pembagian lingkup *fiqh siyasah* menurut para ahli cukup variatif, namun tidak berbeda segi substansi satu sama lain.

Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sulthâniyyah* menyebutkan spektrum dari *siyasah*, terbagi menjadi lima bidang:

a. *siyasah\_Dustûriyyah*.

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 4.

- b. *siyasah\_Mâliyyah*.
- c. *siyasah\_Qadhâ'iyyah*.
- d. *siyasah\_harbiyyah*.
- e. *siyasah\_Idâriyyah*.<sup>5</sup>

Muhammad Iqbal pemikir di Indonesia, dalam bukunya *Fiqh Siyasah* menyederhanakan pembagian *siyasah* menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. *Dustûrriyah syar'iyyah*, meliputi: *tasyrî'iyyah*, *qadhâ'iyyah* dan *idâriyyah*.
- b. *Dauliyah / khârijiyyah syar'iyyah*, meliputi: *al-dauli al-khânsish*, *al-dauli al-'âmm* dan *harbiyyah*.
- c. *Mâliyah syar'iyyah*.<sup>6</sup>

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, riset skripsi ini sangat sesuai dengan program studi hukum tata negara Islam karena lebih spesifik membahas *siyasah dustûrriyah*. *Dustûrriyah* sendiri berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di mana merupakan satu keputusan pemerintah dalam sikap mengatur kehidupan hajat masyarakat yang harmonis (hubungan antara pihak pemerintah disatu sisi dengan pihak rakyat disisi lainya).<sup>7</sup> *siyasah dustûrriyah* sendiri meliputi beberapa bidang, yaitu:

*Siyasah tasyrî'iyyah* (penetapan hukum) dalam hal ini berkaitan dengan *ahl al-Hall wa al-'aqd* (legislatif). Tugas dari legislatif ialah memutuskan peraturan

---

<sup>5</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

<sup>6</sup> *Ibid*, Muhammad Iqbal, h. 15-16.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 36.

(UUD, UU, Peraturan Daerah, dan lain-lain) atas nama umat. *Siyasah qadhâ'iyyah* (peradilan) dalam hal ini berkaitan dengan lembaga yudikatif yang di dalamnya mengurus masalah-masalah peradilan. Terakhir adalah *siyasah idâriyyah* (administrasi pemerintahan). Pembahasan pada bidang merujuk pada eksekutif yang lebih merucut pada masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

## **B. Pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah***

### **1. Kaidah *Fiqh* dalam Pemerintahan**

Pemerintahan secara terminologi berasal dari kata dasar “perintah” atau menyuruh dengan penambahan imbuhan kata “me” dan “an”. Imbuhan “me” dalam kalimat pemerintah menimbulkan arti yang berbeda yaitu suatu lembaga atau instansi negara, arti ini juga akan berbeda bila ada penambahan kata “an” diakhir kalimat yaitu menunjukan sifat perbuatan, cara atau hal dari instansi negara tersebut.<sup>8</sup>

Sejarah Islam mengajarkan bentuk pemerintahan yang pernah digunakan oleh umat Islam, dari bentuk *khilâfah*, *imâmah*, dan kesultanan. Awal mula permasalahan *siyasah* adalah siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Permasalahan tersebut berkembang hingga perbedaan pendapat bentuk pemerintahan dari penafsiran (*ijtihad*) para *mujtahidîn*.

Pembahasan permasalahan *siyasah* oleh para *fuqoha* terdahulu lebih merujuk pada permasalahan kenegaraan yang umum, hal ini disebabkan juga perbedaan antara negara dan pemerintah menurut para *fuqoha* hanya pada pengertian teori dan bukan

---

<sup>8</sup> Inu kencana syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-quran* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) h. 4.

praktek.<sup>9</sup> Permasalahan umum yang sering terlihat adalah para *fuqoha* memperlakukan kenegaraan dalam pemerintah identik dengan tugas dan kewajiban kepala negara.

Perkembang ilmu *fiqh siyasah* atau ilmu ketata negara Islam yang mengatur kepentingan umat agar sejalan dengan ajaran Islam berkembang sangat pesat sampai saat ini. Semangat dalam membuat kebijakan atas kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam inilah yang membuat riset *siyasah* terus berkembang.

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan semangat syariat, adapun substansi kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan kebijakan pemerintah diantaranya :

- a. Berlandaskan ajaran Islam.
- b. Menetapkan manusia pada pangkat yang sama atas konsekuensi tindakan dalam peraturan di pemerintahan (*al-musâwah*).
- c. Menghilangkan kesulitan yang tidak mungkin bagi setiap penduduk dalam melaksanakan aturan (*'adam al-haraj*).
- d. Kebijakan menimbulkan rasa nyaman dan adil di tengah masyarakat (*tahqîq al-'adâlah*).
- e. Memunculkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudhrahatan (*jalb al-mashâlih wa daff al-mafâsid*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Djazuli, h. 131-132.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 345.

Selain kriteria di atas ada pula kaidah-kaidah *fiqh* yang digunakan untuk landasan pemecahan masalah dalam pemerintahan, kaidah-kaidah *fiqh* ini telah disepakati agar pengambilan keputusan atau kebijakan akan sejalan dengan ajaran Islam. Adapun di antara kaidah *fiqh siyasah* tersebut ialah:

- a. perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, situasi, adat, dan niat.<sup>11</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفَوَاعِدِ .

Manusia adalah mahluk sosial, selalu berkembang baik untuk dirinya, masyarakat bahkan negaranya. Perubahan tersebut adalah satu kepastian, dari masa lalu ke masa depan, perubahan keadaan yang tidak bisa dihindari, pergeseran nilai adat, dan niat perubahan itu sendiri. Perubahan tersebutlah yang mengharuskan hukum juga berkembang.

Konteks administrasi pemerintahan, perubahan dapat terjadi apabila suatu kebijakan tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan berlaku yang menginginkan efektif, efisiensi serta keterbukaan sistem administrasi pemerintahan (adat dan niat). Perubahan tersebut diperlukan untuk mengganti atau perubahan sistem yang lama. Bahkan perubahan itu menjadi wajib apabila dampak yang lebih baik akan terjadi dan keburukan akan bertambah bila tetap mempertahankan sistem yang lama.

- b. Tindakan (*tasharruf*) kebijakan iman (pemerintahan) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 17.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِأَمْرِ الْمَصْلَحَةِ .

Kebijaksanaan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan didasarkan akan kesejahteraan dan kepentingan umum. Kebijakan pemimpin harus dilandaskan pada apa yang dibutuhkan masyarakat (kemaslahatan umat) dan mengesampingkan keinginan pribadi yang egois. Dampak dari suatu putusan kebijakan pemimpin negara akan langsung dirasakan oleh masyarakat apakah kebijakan tersebut membawa berkah atau petaka. Sungguh pemimpin adalah orang yang membawa rakyatnya pada pintu surga atau neraka karena kebijakannya.

## 2. Prinsip Pemerintahan dalam *Fiqh Siyasah*.

Praktik politik (*siyasah*) telah tercatat di sejarah Islam. Sebagian pendapat ahli mengemukakan bahwa politik Nabi Muhammad SAW terjadi sejak berada di Mekah, namun titik balik dari politik kenegaraan nabi adalah ketika pasca beliau hijrah ke Madinah. Sebagian ahli sepakat bahwa Madinah adalah negara Islam pertama yang dibentuk oleh nabi, di mana telah memenuhi unsur sebagai negara diantaranya yaitu adanya, wilayah, rakyat, dan pemerintahan.

Kebijakan yang diambil oleh nabi ketika tahun pertama hijriah adalah penetapan Piagam Madinah yang mengikat masyarakat Madinah.<sup>13</sup> Piagam Madinah adalah bukti bahwa harus adanya supremasi hukum (konstitusi) yang berdaulat, agar

<sup>12</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta : Kalam Mulia, 2013), h. 61.

<sup>13</sup> A.Dardiri Hasyim, ‘‘Good Governance dan Piagam Madinah’’ (Makalah yang disampaikan pada seminar nasional dalam rangka Dies Natalis UNIBA ke 31, Surakarta, 2014). h. 33.



memudahkan pemerintah mengatur masyarakat. Disampaikan pada seminar nasional, UNIBA tahun 2014, oleh A. Dardiri Hasyim. Beliau menyimpulkan bahwa terdapat enam (6) prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah yaitu :

- a. *Ummah*, yaitu kebebasan masyarakat Madinah ikut serta dalam pengurusan pemerintahan.
- b. *Aadiluun*, yaitu masyarakat baik penduduk asli Madinah atau bukan, memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.
- c. *Mahdhun*, yaitu bahwa negara memberikan kebebasan pada setiap warga untuk beraktifitas selama tidak bertentangan dengan agama dan etika dalam masyarakat.
- d. *Dzakiyyun*, yaitu adanya persamaan visi-misi masyarakat dan pemerintah (saling membantu) dalam membangun negara.
- e. *Al-Maslahatu*, yaitu memaksimalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki dengan manajemen profesional.
- f. *Asadun*, yaitu satu kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan harapan. Pemerintahan diharapkan kuat dan dapat mengayomi masyarakat.<sup>14</sup>

Pendapat lain disampaikan Ija Suntana dalam bukunya *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, bahwa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Piagam Madinah ada 15, yaitu: kebangsaan, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, hubungan antara-pemeluk agama, pertahanan dan keamanan, kerukunan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 37.

sesama warga, tolong-menolong, pembelaan masyarakat lemah, perdamaian, musyawarah, keadilan, supremasi hukum, kepemimpinan, penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman.<sup>15</sup>

Ija Suntana juga mengutip pendapat Abd Al-Hamid Ismail Al-Anshari tentang prinsip ketatanegaraan Islam meliputi lima prinsip, yaitu: persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*asy-syura*), kebebasan (*al-hurriyyah*), tanggung jawab publik (*al-mas'uliyah al-ammah*).<sup>16</sup>

Meringkas prinsip dasar yang telah dikemukakan di atas menyimpulkan terdapat 3 bagian penting dalam prinsip suatu pemerintah Islam dan harus dimiliki. Terlihat 3 bagian prinsip adalah satu kesatuan dalam suatu negara dan tidak dapat dipisahkan, namun dalam praktik tiga bagian itu dapat di kelompokkan berdasarkan sifat prinsip itu berasal dan harus tercipta:

- a. Prinsip pemerintahan, merupakan asas yang berasal dari pemerintah baik yang melekat atau timbul dari suatu kondisi dalam pemerintah. Asas ini dapat diwakili dengan, Manajemen pemerintahan (*al-maslahatu*), harapan masyarakat pada pemerintah (*asadun*), kepemimpinan, supremasi hukum Allah.
- b. Prinsip masyarakat, menjelaskan bahwa asas ini timbul dan berkembang dalam masyarakat atau merupakan asas yang diberikan pemerintah kepada

---

<sup>15</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 104.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 31.

- masyarakat. kebebasan (ummah, mahdhun / al-hurriyyah), persamaan ( al-musawah), persatuan dan kerukunan, saling tolong-menolong.
- c. Prinsip Bersama, adalah asas yang melekat dan harus ditegakkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. hak dan kewajiban (aadiluun), visi-misi membangun negara (dzakiyyun), keadilan (al-adalah), tanggung jawab publik (al-mas'uliyah al-ammah), musyawarah (asy-syura), menegakkan kebenaran dan memberantas kezaliman.

Secara universal dalam Al-Qur'ân dan Al-Sunnah juga menjelaskan asas-asas pemerintahan, antara lain :

- a. Pertanggungjawaban.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( المَدَّثَر/74 :38)

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-muddassir: 38)*<sup>17</sup>

Tafsir ayat di atas menurut M. Quraish Shihab merupakan pernyataan Allah kepada seluruh manusia di muka bumi berkaitan dengan kebebasan memilih. Hal ini di jelaskan dalam ayat sebelumnya seakan Allah SWT menyatakan “Hai manusia kamu bebas memilih jalan, maju atau mundur, kiri atau kanan, tapi hendaklah mengetahui keadaanmu kelak diakhirat berdasarkan apa yang kamu lakukan”<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, QS. Al-muddahthir ayat 38, (Tangerang Selatan: PT.Kalim, 2010).

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 605.

Dalam pertanggungjawaban, pemerintah harus bertanggungjawab pada setiap kebijakan yang diambil kepada rakyat. Asas tanggung jawab erat kaitanya dengan tujuan *fiqh siyasah* yaitu memberikan kemaslahatan dan kemakmuran bagi masyarakat. Asas pertanggungjawaban juga disinggung oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (BUKHARI - 2232)<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Imam Al Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terjemah Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriyah, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 595.

Dalam Islam pertanggungjawaban adalah prinsip penting karena setiap perbuatan walau sebesar biji zahra pasti mendapat balasan. Dalam pemerintahan pertanggungjawaban identik dengan tugas, jabatan dan kekuasaan penguasa. Penguasa tidak boleh sewenang-wenang dan mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyat.

b. Amanah, Adil dan Pengawasan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء/4: 58)

*Artinya: Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. (QS. An-Nisa: 58)*<sup>20</sup>

Asbabun nuzul ayat di atas menurut Ibnu Abbas, setelah Mekah berhasil ditaklukan, Rasulullah memanggil Utsman bin Thalhah untuk menerima kunci Ka'bah. Saat Utsman mengeluarkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah, tiba-tiba Abas berdiri dan berkata “Wahai Rasulullah, demi Allah berikan kunci itu kepadaku agar aku rangkap tugas sebagai pemberi minum dan pemegang kunci Ka'bah sekaligus”. Utsman pun kembali menahan kuncinya. Melihat itu Rasulullah bersabda “wahai Utsman, berikan kunci itu kepadaku.” Utsman berkata, “Wahai Rasulullah, kunci ini aku berikan dengan amanah Allah. “Rasulullah pun berdiri, membuka pintu Ka'bah dan masuk kedalamnya. Setelah

<sup>20</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. An-Nisa ayat 58.

itu, beliau melakukan thawaf. Tak lama kemudian, Jibril datang dan menyampaikan pesan dari Allah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman. Rasulullah pun memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Kemudian turunlah ayat ini (HR. Ibnu Mardawaih)<sup>21</sup>

Menurut M. Quraish Shihab ditafsirkan bahwa Allah memerintahkan orang beriman menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu, kepada yang berhak. Baik amanat tersebut berasal dari Allah atau amanat orang lain. Apabila menetapkan suatu hukum haruslah berlaku adil, dalam menentukan suatu keputusan hukum tidak ada keberpihakan dan jangan berlaku curang. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar dan melihat apa yang kamu lakukan, dan setiap tindakan akan mendapat ganjarannya.<sup>22</sup>

Dari tafsir di atas dapat disimpulkan terdapat tiga (3) poin penting yang terkandung dalam ayat tersebut. Tiga poin penting ini merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan, yaitu:

- 1) أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ menyampaikan amanah, pemerintah haruslah jujur dan dapat dipercaya, maksud dapat dipercayai yaitu ketika diberi amanah oleh rakyat maka pemerintah sebagai pemimpin harus melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya. Karena amanah merupakan suatu yang harus dijaga dan dipelihara, terutama pemerintah sebagai pemimpin masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Dikutip dalam Al-Quran Departemen Agama RI.

<sup>22</sup> *Ibid*, M. Quraish Shihab, h. 480.

2) أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ menetapkan hukum secara adil, sesungguhnya adanya pemerintah tidak lain mempunyai tujuan untuk menegakkan keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam pemerintahan, apabila dalam suatu pemerintahan tidak ada keadilan, niscaya pemerintahan itu akan hancur. Keadilan juga suatu hal penting yang perlu diperjuangkan oleh masyarakat. Keadilan merupakan hak mendasar bagi kehidupan masyarakat.

3) سَمِيعًا بَصِيرًا Pengawasan, banyak ayat menyebutkan kebesaran Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Setiap tindakan manusia akan diawasi oleh Allah tidak terkecuali tindakan pemerintah. Sungguh pemerintahan bukanlah sesuatu yang sempurna seperti Allah. Maka dibutuhkan pengawasan oleh rakyat, fungsi pengawasan adalah membantu pemerintah dari luar agar tidak keluar dari tugasnya.

#### c. Transparansi Administrasi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/2: 282)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*



*Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendapatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)<sup>23</sup>*

Asbabun nuzul ayat di atas diriwayatkan Ibnu Abbas, para penduduk asli Madinah terbiasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, dan tiga tahun, Rasulullah pun bersabda, “Siapa yang menyewakan sesuatu, hendaklah dengan ukuran dan waktu yang tertentu, kemudian Allah menurunkan ayat ini.”(HR. Bukhari)<sup>24</sup>

Ayat di atas adalah ayat berkenaan penjelasan Allah tentang masalah utang-piutang yang dilakukan oleh hambanya. M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut menjelaskan kepada orang beriman apabila melakukan utang-piutang dianjurkan melakukan pencatatan. Pencatatan dimaksudkan agar ada

---

<sup>23</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Al-Baqarah ayat 282.

<sup>24</sup> Ibid, Dikutip dalam Al-Quran Departemen Agama RI.



kejelasan waktu dan untuk menghindari perselisihan. Orang yang mencatat haruslah orang yang adil, takut kepada Allah dan tidak mengurangi atau menambah jumlahnya. Apabila orang yang berutang kurang cakap (kecil, sakit, pikun, tua, lemah berhitung, dan lainnya) hendaklah memilih wali untuk mendektekan catatan utang. Suruhlah dua orang laki-laki bila tidak ada boleh satu laki dan dua perempuan untuk menjadi saksi. Janganlah bosan mencatat segala persoalan yang kecil maupun besar karena hal tersebut lebih baik disisi Allah dan menghindari keraguan diantara kalian. Hindarilah menyakiti penulis dan saksi demikian itu berarti tidak taat kepada Allah.<sup>25</sup>

Dalam konteks pemerintahan ayat di atas dapat diartikan sebagai, pentingnya administrasi dalam bernegara atau sikap transparansi dalam pemerintah. Prinsip Administrasi atau pencatatan adalah solusi terbaik dalam menghindari perselisihan yang akan datang. Sungguh manusia adalah tempat salah di mana lupa dan tamak bisa menjadi satu contoh. Dalam administrasi penting juga adanya transparansi administrasi dalam menegakan pemerintahan. kenapa pemerintah harus transparan dalam administrasi seperti dijelaskan ayat di atas yaitu untuk menghindari perselisihan dan keraguan masyarakat. sangat perlu adanya transparansi pemerintahan, sifat transparan yang terbuka pada siapapun (pemerintah pada rakyat) mengakibatkan timbul saling percayaan dan saling mengawasi hingga terciptanya pemerintah yang baik.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, M. Quraish Shihab, h. 561-569.

d. Profesional

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (الشرح/94: 7)

Artinya: Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (QS. Asy-Syarh: 7)<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan segala hal harus secara maksimal. Allah menyuruh hambanya agar senantiasa bersungguh-sungguh. Sifat sungguh-sungguh ini dalam pemerintahan dikenal dengan prinsip profesional. Pemerintah yang baik harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' 'Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari: 6015)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Asy-Syarh ayat 7.

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al Ashqalani, *Fatuhul Bari Syarah Shahih Bukhari*, terjemahan Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011).

Nabi menjelaskan pentingnya sifat profesional dalam mengangkat administrator. Seorang administrator yang diberikan amanah haruslah sesuai dengan ahlinya sehingga dia dapat bersifat profesional pada pekerjaannya.

e. Persamaan Visi-Misi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفُونَ فَضْلًا  
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة/5: 2)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan janganlah kamu (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban) dan qala-id (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka yang mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Jangan sampai membenci (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah : 2)<sup>28</sup>

Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Zaid bin Aslam menuturkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat berada di Hudaibiyyah, yang dihalangi orang-orang musyrikin untuk sampai Baitullah. Keadaan ini membuat para sahabat marah. Suatu ketika dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun

<sup>28</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Al-Maidah ayat 2.

berkata “Bagaimana jika kita juga menghalangi mereka, sebagaimana kita pernah dihalang-halangi” (HR. Ibnu Abi Hatim)<sup>29</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas secara umum tentang haji dan umrah. Penjelasan tersebut berkaitan tentang apa yang tidak boleh dan boleh dalam keadaan haji, umrah, bulan-bulan suci, dan mengganggu pengunjung tanah suci. Larangan melanggar syiar agama Allah dan bahkan ajaran agama lain. Melarang membenci suatu kaum hingga melampaui batas, menghalanginya beribadah dan berbuat aniaya. Larangan saling membantu berbuat dosa dan harus saling membantu dalam kebajikan. Dijelaskan dalam tolong menolong dalam kebajikan ini merupakan prinsip kerjasama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebajikan.<sup>30</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa suatu keadaan akan menjadi lebih baik apabila memiliki visi misi yang sama yaitu tentang kebajikan. Prinsip persamaan visi-misi antara rakyat dan pemerintah adalah saling menolong dan membantu. Pemerintah akan hancur apabila satu kaum dengan kaum lainnya saling membenci bahkan melampaui batas. Suatu pemerintah akan hancur bila suatu kaum bekerja sama dalam kejahatan untuk melanggar kaum lainnya. Maka di sinilah pentingnya persamaan visi misi antara rakyat dan pemerintah harus bekerja sama dalam menjunjung kebaikan dan kesejahteraan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Dikutip dalam Al-Quran Departemen Agama RI.

<sup>30</sup> *Ibid*, M. Quraish Shihab, h. 9-14.

#### f. Partisipasi Masyarakat

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران/3: 159)

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran : 159)<sup>31</sup>

Asbabun nuzul ayat di atas dari Ibnu Abbas menjelaskan setelah perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khathtab untuk meminta pendapat mereka tentang tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan, namun Umar bin Khathtab berpendapat lain. Mereka sebaiknya dibunuh dan keluarga merekalah yang diperintahkan membunuh. Rasulullah kesulitan untuk memutuskan. Kemudian turunlah ayat di atas sebagai dukungan atas Abu Bakar. (HR. Kalabi)<sup>32</sup>

Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab menjelaskan ayat di atas berkenaan dengan perang uhud yang dalam kandungannya Allah membimbing Nabi Muhammad agar berlaku lemah lembut walaupun dalam kekerasan perang tidak terhindarkan. Penekanan kedua ayat tersebut bermakna perintah melakukan musyawarah. Kesalahan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan tanpa

<sup>31</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Ali Imran ayat 159.

<sup>32</sup> Ibid, Dikutip dalam Al-quran Departemen Agama RI.

melakukan musyawarah. Musyawarah adalah satu solusi mencari jalan tengah diantara banyak cara yang dikemukakan tiap individu karena persoalan tidak ada dalam Al-quran. Dalam melakukan musyawarah langkah pertama adalah bertekad bertawakal kepada Allah.<sup>33</sup>

Musyawarah merupakan prinsip pemerintah dalam *fiqh siyasah*. musyawarah bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah, yang menyatakan kebaikan yang dapat dikeluarkan. Madu tidak hanya manis namun juga dapat sebagai obat, itulah perandaian dari musyawarah. Prinsip musyawarah telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada masanya. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah sangatlah penting, apa jadinya sebuah pemerintah yang rakyatnya tidak ikut andil dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat akan mendorong pemerintah pada menyelesaikan permasalahan yang belum pernah ada dan menuju kemaslahatan. Hal inilah yang membuat musyawarah (partisipasi masyarakat) sangat penting.

#### g. Prinsip Amal Makruf Nahi Mungkar

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران/3: 110)

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali-Imran: 110)*<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ibid, M. Quraish Shihab, h. 255- 259.

<sup>34</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Ali-Imran: 110

M. Quraish Shihab menjelaskan umat terbaik di sini adalah seluruh umat Nabi Muhammad, dikatakan terbaik karena sifat yang melekat pada diri mereka. Sifat yang melekat adalah menyeru pada yang *makruf* dan mencegah pada yang *mungkar*. Dalam melakukan *amr makruf nahi mungkar* itu telah mengikuti dan sesuai cara dan kandungan yang diajarkan.<sup>35</sup>

Prinsip pemerintahan Islam di sini adalah menegakkan keadilan dan melawan kejahatan. Salah satu tugas pemerintah adalah pengayoman, pemerintah harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. prinsip ini sangat penting ditegakkan, apabila pemerintah tidak bersungguh-sungguh menegakkan maka hanya kehancuran yang menunggu pemerintahan.

### **C. Jalinan Hubungan antara Pemimpin dan Rakyat**

Pemimpin negara di dalam pemerintahan merupakan sebuah simbol bahwa wajib memiliki seorang pemimpin. seseorang pemimpin dipilih oleh umat untuk mengurus dan mengatur kemaslahatan umat agar tidak ada perpecahan. Hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan persaudaraan dan saling mencintai, di mana rakyat mencintai pemimpin dan pemimpin mencintai rakyatnya. Saling mendoakan dan bukan saling membenci dan menjelek-jelekan.<sup>36</sup>

Muhammad Iqbal menggambarkan pemimpin adalah posisi imam dalam sholat berjamaah, di mana jamaah harus mengikuti gerakan imam. Apabila imam

---

<sup>35</sup> *Ibid*, M. Quraish Shihab, h. 184-185.

<sup>36</sup> Imam An Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, ( Jakarta: Darus Sunnah, 2013 ).



melakukan kesalahan dalam sholatnya, jamaah dapat melakukan “koreksi” pada imam tanpa merusak sholat tersebut.<sup>37</sup> Perandaian terhadap sholat, imam, dan jamaah tersebut adalah analogi dari pemerintahan, pemimpin dan rakyatnya. Setiap unsur memiliki porsi hak dan kewajiban dalam pemerintahan.

### 1. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Dalam *fiqh siyasah* kata pemimpin memiliki sebutan lain yaitu, *imâm*, khalifah, malik (raja) dan sultan. Seorang pemimpin bukanlah orang yang luar biasa dan maha kuasa. Pemimpin tidak berbeda dengan rakyatnya. Ia adalah pelayan umat karena bertugas mengurus dan mengatur kemaslahatan meski demikian pemimpin juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pemimpin tertinggi negara.

Hak pemimpin erat kaitanya dengan kewajiban rakyat, seperti kewajiban rakyat untuk mematuhi dan mendukung pemimpin. Hak pemimpin ini dapat dilihat dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (النساء/4: 59)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa 59)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ibid, Muhammd Iqbal h. 241.

<sup>38</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. An-Nisa ayat 59.



Selain ayat di atas Al-Mawardi memiliki pendapat sama tentang hak pemimpin, beliau menyebutkan 2 hak pemimpin, yaitu hak dipatuhi dan hak didukung.<sup>39</sup> Maksud dipatuhi ialah mengikuti semua perintah pemimpin, selama perintah tersebut tidak menyuruh melakukan maksiat atau dosa kepada Allah. Arti mendukung ialah bahwa pemimpin harus dibela dan didukung dalam menjalankan pemerintahan, bahkan Ketika salah rakyat harus mendukung dengan mengingatkan bahwa ia telah salah. Hak tambahan adalah hak mendapat gaji. hak ini dilatar belakangi ketika 6 bulan Khalifah Abu Bakar menjabat, beliau masih berdagang di pasar untuk menghidupi keluarganya.<sup>40</sup>

Muhammad Rasyid Ridho menyimpulkan tugas-tugas dari seorang pemimpin negara meliputi 4 bidang saja, yaitu : mengembangkan dakwah Islam dan menegakan kebenaran, menegakan keadilan, melindungi agama dari pengacau dan menolak *bid'ah*, bermusyawarah dan menetapkan hukum-hukum yang tidak diatur secara tegas oleh nash.<sup>41</sup> Seorang pemimpin dipilih ialah untuk menegakkan kebenaran menjaga bumi dan memperbaiki ahlak yang berbudi. Setiap orang adalah pemimpin dirinya sendiri, ada yang dipilih untuk memimpin kelompok negara karena merasa bahwa ia dapat memimpin dan menyelamatkan dunia dan akhirat dengan kepemimpinannya.

Sementara Djazuli mengaitkan kewajiban pemimpin dengan *maqasidu Syariah* dan menyimpulkan 3 sifat tugas dan kewajiban pemimpin, yaitu: (1) bersifat *dharuriyah* meliputi, *hifzh al-dīn* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa),

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Al-Mawardi, h. 35.

<sup>40</sup> *Ibid*, Muhammad Iqbal, h. 246-247.

<sup>41</sup> *Ibid*, Muhammad Iqbal, h. 243.

*hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl/iridl* (menjaga keturunan), *hifzh al-mal* (menjaga harta), dan *hifzh al-ummah* (menjaga rakyat). (2) bersifat *hajjiyah*, yaitu tentang kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugas. (3) bersifat *tahsiniyah*, yaitu mengarah pada pemeliharaan keindahan dan seni dalam batas ajaran Islam.<sup>42</sup>

Allah dalam firmanNya juga menjelaskan secara umum tugas dan kewenangan pemimpin dalam Al-Qur'ân yang berbunyi ;

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج/22: 41)

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi niscaya mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS. Al-Hajj:41)<sup>43</sup>

Ayat di atas menjelaskan 3 kewajiban yang harus ditegakkan seorang pemimpin, yaitu menjaga agama, menjaga ekonomi, dan menjaga keadilan. Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sulthâniyyah memaparkan secara lebih terperinci yaitu 10 (sepuluh) kewajiban yang harus dijalankan kepala negara, antara lain:

- a. Memelihara agama sesuai ajaran kesepakatan ulama salaf.
- b. Menjalankan hukum, menyelesaikan perselisihan dan mendamaikan permusuhan hingga timbul keadilan tanpa penindasan.
- c. Menjaga keamanan dalam negara.
- d. Menegakkan hukum sehingga terjaminnya HAM bagi rakyat.
- e. Memperkuat pertahanan negara dari serangan luar.

<sup>42</sup> Ibid, Djazuli, h. 96-97.

<sup>43</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Al-Hajj ayat 41.

- f. Melawan musuh Islam yang membangkang dan berkhianat.
- g. Mengelola keuangan negara, ghanimah, al-fai, pajak dan sedekah lainnya.
- h. Menentukan belanja negara ( APBN)
- i. Mengangkat administrator berdasarkan kejujuran, keadilan, profesional dan kepercayaan memegang amanat.
- j. Secara langsung turun dan mengurus urusan negara secara umum.<sup>44</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Rakyat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49: 13)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al- Hujarat: 13)<sup>45</sup>

Rakyat atau bisa disebut *ummah* adalah masyarakat warga muslim dan non muslim (kafir dzimi) yang menetap di suatu negara. Rakyat merupakan unsur penting dalam adanya negara dan tujuan utama kenapa dibentuknya pemerintah dalam *fiqh siyasah*. Selain rakyat, Islam mengenal istilah *musta'min* yaitu orang asing yang menetap sementara.

Nabi Muhammad SAW merupakan suritauladan sebagai pemimpin pemerintahan. Beliau adalah contoh bagaimana pemerintah memberikan hak dan

<sup>44</sup> Ibid, Al-Mawardi, h. 33-34.

<sup>45</sup> Ibid, Departemen Agama RI, QS. Al- Hujarat ayat 13.

kewajiban kepada rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Piagam Madinah, di mana warga muslim dan non muslim memiliki hak dan kewajiban sama sebagai rakyat.

Rakyat baik muslim dan non muslim memiliki hak yang sama, yaitu: tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, hartanya, memiliki hak kemanusiaan, hak sipil, dan hak politik. Suyuti Pulung menjelaskan *siyasah* menjamin rakyat dengan hak asasi manusia (HAM) terdapat delapan hak yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Hak untuk hidup, dijelaskan dalam QS. Al-Isro: 33.
- b. Hak mencari nafkah, dalam QS. Al-Baqarah: 188.
- c. Hak untuk dihormati, dalam QS. Al-Nur: 27.
- d. Hak berpendapat, dalam QS. Al-Ashr: 1-3.
- e. Hak kebebasan beragama, dalam QS. Al-Baqarah: 256.
- f. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri, QS. Al-Syura: 41.
- g. Hak kebebasan dari penganiayaan, dalam QS. Al-A'raf: 33.
- h. Hak kebebasan rasa takut, dalam QS. Al-Maidah: 32.<sup>46</sup>

Abdul Kadir Audah menyebutkan ada dua hak rakyat, yaitu: hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Berbeda dengan Abu A'la al-Maududi menyebutkan rakyat memiliki empat hak, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi

---

<sup>46</sup> Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 13-16.

- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Dzajuli menyebutkan kewajiban seorang rakyat berkaitan dengan hak pemimpin. Kewajiban rakyat adalah mematuhi dan mendukung pemimpin pada kebajikan yang bersifat kemaslahatan. Al-mawardi berpendapat kewajiban rakyat dalam mematuhi pemimpin akan gugur bila pemimpin melakukan kezoliman, tidak adil dan kehilangan kemampuan fisiknya. Al-Mawardi menyebutkan juga perbedaan hak rakyat muslim dan non muslim adalah hak menjadi pemimpin.

#### **D. Sikap Diam Nabi Pada Sahabat**

Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan umat Islam. diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan ahlak manusia. Segala hal yang disandarkan oleh nabi adalah tuntunan baik itu perkataan, perbuatan, sifat, dan takrir yang semuanya termasuk dalam sunnah nabi. Salah satu jalan mempelajari sunnah nabi adalah melalui hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW. Terdapat jenis bentuk hadis diantaranya: qauli, fi'li, taqrir, hammi, ahwali, dan lainnya.<sup>47</sup>

Hadis taqriri merupakan hadis tentang ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat. Nabi Muhammad SAW membiarkan atau mendiamkan hal tersebut tanpa membenarkan atau mempermasalahkannya. Hadis taqriri jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan bentuk hadis yang lain, contoh hadis ini diantaranya:

---

<sup>47</sup> M. Solahudin, Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15-20.

## 1. Diamnya Nabi ketika sahabat menafsirkan pelaksanaan sholat Ashar

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مَنَا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفْ وَاحِدًا

مِنْهُمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika perang al-Ahzab: "Janganlah seseorang melaksanakan shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan shalat 'Ashar di perjalanan sementara sebagian yang lain berkata; "Kami tidak akan shalat kecuali setelah sampai di perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan; "Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu." Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun." (BUKHARI - 3810)

## 2. Diamnya nabi ketika sahabat memakan daging biawak

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيُّ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ

الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ

عِنْدَهَا صَبًا مَحْنُودًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حَفِيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الصَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَمًا

يُقَدَّمُ يَدُهُ لَطْعَامٍ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الصَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ

الْحُضُورِ أَخْبَرَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتَنَ لَهُ هُوَ الصَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ

عَنِ الصَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الصَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ

فَاكْلَتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Al Khalid yang juga dijuluki sebagai Saifullah telah mengabarkan kepadanya; Bahwa ia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemui bibinya yaitu Maimunah yang juga bibi daripada Ibnu Abbas. kemudian ia mendapati biawak yang telah terpanggang yang dibawa oleh saudara bibinya yakni, Hudzaifah bintu Al Harits dari Najed. Maka Maimunah pun menyuguhkan Biawak itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jarang sekali beliau memajukan tangannya untuk mengambil makanan hingga beliau dipersilahkan bahwa makanan itu untuk beliau. Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggerakkan tangannya ke arah biawak, lalu seorang wanita yang hadir di situ berkata dan memberitahukan kepada beliau tentang makanan yang telah disuguhkan, "Itu adalah Biawak ya Rasulullah?" Maka seketika itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam segera menarik tangannya kembali dari daging Biawak sehingga Khalid bin Al Walid pun bertanya, "Apakah daging Biawak itu haram ya Rasulullah?" beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya." Khalid berkata, "Lalu aku pun menarik dan memakannya. Sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat ke arahku." (BUKHARI - 4972)

Contoh hadis di atas memiliki kesamaan yaitu sikap nabi yang tetap diam meski telah mengetahui suatu masalah. Sikap diam nabi ini dapat diartikan sebagai persetujuan kepada sahabat, karna apabila tidak nabi akan langsung melarang secara tegas karna hal itu bertentangan dengan ajaran islam.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 1998), h. 50.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadis

Al Ashqalani, Ibnu Hajar, *Fatuhul Bari Syarah Shahih Bukhari*, terjemahan Amirudin, Jakarta: Pustaka Azzam 2011.

Al Mundziri, Imam, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terjemah Rohmad Arbi Nur Shoddiq, Arif Mahmudi, Nila Noer Fajriyah, Jakarta: Ummul Qura, 2016.

An Nawawi, Imam, *Syarh Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Departemen Agama RI, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: PT.KALIM, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Permohonan Fiktif Positif.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.



## Buku

- Abdullah, Ali, *Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ilham Rafai hasan, *Urgensi Penetapan Manajemen Pembangunan Nasional pada lini lokal*, jakarta: Colloquium Ketahanan Nasional RI, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Khon, Abdul Majid, *Ikhtisar Tarikh tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakara: LAN dan BPKP, 2000.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah Kaidah Ilmu fiqih*, Jakarta : Kalam Mulia, 2013.
- Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Kuhulafa Ar-Rasyidun*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

syafi'ie, Inu kencana, *ilmu pemerintahan dan Al-quran*, jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Suntana, Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Solahudin. M dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Syarif, Muja'ib Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta: PT.Mutiara Sumber Widya, 1998

#### **Jurnal dan Penelitian**

Ahmad, Penerapan Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara., *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2, September 2017.

Enrico, Simanjuntak, Perkara Fiktif Positif Dan Permasalahan Hukumnya, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. VI No. 3, November 2017.

Hasyim, A. Dardiri, Good Governance Dan Piagam Madinah, *Makalah yang disampaikan pada seminar nasional dalam rangka Dies Natalis UNIBA ke 31*, Surakarta, 2014.

Hanapiah, Pipin, Good Governance: Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis, Makalah disampaikan dalam kegiatan *Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Bakom-PKB*, kabupaten Purwakarta, 31 Oktober 2007.

Jailani, Pelayanan Publik: Kajian Pendekatan Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 19, No. 27, 2013.

Kharisma, Bayu, Good Governance Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol.19 No.1, Februari 2014.

Nuriyant, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia Sudahkah Berlandas Konsep "welfare state"?, *Jurnal Konstitusi*, vol. XI No.3, september 2014.

Pratiwi, Cekli Setya, et.al. "Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara". *Judicial Sector Support Program*, Leiden-Jakarta, 17 mei 2016.

Prabowo, Yulian, "Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi di Kelurahan Way Dadi Baru", Skripsi Jurusan Siyasah UIN Raden Intan, Lampung, 2017.

Rodding, Budiamin, Keputusan Fiktif Negatif Dan fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik, *Tanjungpura Law Journal*, vol. I No. 1, Januari 2017.

## Internet

-----, "Administrasi Negara: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup, Karakteristik, dan Contoh". (On-line), tersedia di: <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-administrasi-negara.html> (24 juli 2019).

-----, "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan" (On-line), tersedia di : <http://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/> (24 juli 2019).

-----, "kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016 (On-line), tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintahan> (4 Februari 2020)

-----, "PTUN JAKARTA" (On-line), tersedia di: [https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list\\_perkara/page/1/eFBaOWE2YkpUZk40UXhCTU1rcUNNa0djbIJ2cDNwUmIvSEFXandlVVdJcStTQkRQMnZCNTIMOHWsIFkbEpGN1FqWitvVHVDTXVmYzBxOTM2VXFtS1E9PQ==/key/c0l/2](https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list_perkara/page/1/eFBaOWE2YkpUZk40UXhCTU1rcUNNa0djbIJ2cDNwUmIvSEFXandlVVdJcStTQkRQMnZCNTIMOHWsIFkbEpGN1FqWitvVHVDTXVmYzBxOTM2VXFtS1E9PQ==/key/c0l/2) (4 Februari 2020).

-----, "PTUN JOGYAKARTA" (On-line), tersedia di: [http://sipp.ptun-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/type/T29EOHVZVVTaHkvK1VQcnMyY2E4NmpUNTJLSjBlMG5DZERaUE9Hd05MSUs4Sm5ramFyQnR4VnBwa3dRVnRZcFcZnkREckp5ODZHUGRPeDF2eEhkUXc9PQ==](http://sipp.ptun-yogyakarta.go.id/list_perkara/type/T29EOHVZVVTaHkvK1VQcnMyY2E4NmpUNTJLSjBlMG5DZERaUE9Hd05MSUs4Sm5ramFyQnR4VnBwa3dRVnRZcFcZnkREckp5ODZHUGRPeDF2eEhkUXc9PQ==) (4 Februari 2020).

-----, “Pungli di Pelayanan Publik Diakui Turunkan Wibawa Pemerintah” (On-line), tersedia di :  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/12090911/pungli-di-pelayanan-publik-diakui-turunkan-wibawa-pemerintah> (20 November 2020)

